

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERNYATAAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
INTISARI .....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
1. Tujuan Objektif.....	7
2. Tujuan Subjektif.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian.....	12
1. Manfaat Teoritis .....	12
2. Manfaat Praktis.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	14
A. Tinjauan Umum tentang Sistem Kepartaian .....	14
1. Pendekatan Klasifikasi Sistem Kepartaian.....	14
2. Tipologi Sistem Kepartaian .....	15

B. Tinjauan Umum tentang Sistem Pemerintahan .....	17
1. Tipologi sistem pemerintahan .....	18
2. Sistem Presidensial dan Dinamika Penerapannya di Indonesia .....	20
C. Tinjauan Umum tentang Pemilihan Umum.....	31
1. Definisi Pemilihan Umum .....	32
2. Fungsi Pemilu .....	33
3. Unsur dan Klasifikasi Pemilu .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	44
B. Bahan Penelitian.....	46
1. Bahan Hukum Primer .....	47
2. Bahan Hukum Sekunder.....	49
3. Bahan Hukum Tersier.....	50
C. Metode Pengambilan Data .....	50
D. Tahapan Penelitian.....	51
E. Analisis Data .....	54
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>56</b>
A. Urgensi Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR Pasca Reformasi.....	56
1. Ketidaksesuaian Penerapan Sistem multipartai dalam Negara yang Menganut Sistem Presidensial .....	56
2. Analisis Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum Pasca-Reformasi dan Implikasinya pada Jumlah Partai di DPR.....	89
B. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik di DPR dalam Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum Pasca Reformasi.....	108
1. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik yang masuk dalam DPR dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum..	110

2. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik yang masuk dalam DPR dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	116
3. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik yang masuk dalam DPR dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	124
4. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik yang masuk dalam DPR dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	135
5. Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik yang masuk dalam DPR dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum..	144
6. Perbandingan Pengaturan terkait Unsur-Unsur Pemilu dan Sistem Pemilu pada Undang-Undang tentang Pemilu Legislatif Pasca-Reformasi dalam Konteks Penyederhanaan Jumlah Partai yang Masuk dalam DPR.....	153
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>160</b>
A. Kesimpulan .....	160
B. Saran.....	162
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>163</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tipe-Tipe Sistem Kepartaian .....	15
Tabel 2.2. Perbedaan Sistem Presidensial dan Sistem Parlementer.....	19
Tabel 2.3. Kelebihan dan Kelemahan Penerapan Sistem Pemerintahan Presidensial .....	23
Tabel 4.3. Perbandingan Presidensialisme dan Parlemenarianisme Pada UUD 1945 Pasca-amandemen.....	65
Tabel 4.4. Klasifikasi Sistem Kepartaian menurut Giovanni Sartori.....	67
Tabel 4.2. Desain Lembaga Kpresidensial .....	70
Tabel 4.5. <i>Policy-seeking</i> , <i>vote-seeking</i> , dan <i>office-seeking</i> : Pengukuran Operasional .....	73
Tabel 4.6. Rata-Rata <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> pada Negara-Negara Presidensial Stabil .....	81
Tabel 4.7. <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> Tahun 2004-2009 .....	83
Tabel 4.8. <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> di Indonesia Tahun 2009-2014.....	84
Tabel 4.9. <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> Tahun 2014-2019 .....	85
Tabel 4.10. <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> Tahun 2019-2024 .....	86
Tabel 4.11. <i>Rae Index of Party System Fragmentation and the Effective Number of Parties</i> di Indonesia Pasca Reformasi .....	87

Tabel 4.12. Pengaturan tentang unsur-unsur dan Sistem Pemilu dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilu terkait Penyederhanaan Jumlah Partai di DPR.....	112
Tabel 4.13. Pengaturan tentang unsur-unsur dan Sistem Pemilu dalam UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait Penyederhanaan Jumlah Partai di DPR .....	118
Tabel 4.14. Pengaturan tentang unsur-unsur dan Sistem Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait Penyederhanaan Jumlah Partai di DPR .....	126
Tabel 4.15. Pengaturan tentang unsur-unsur dan Sistem Pemilu dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD terkait Penyederhanaan Jumlah Partai di DPR .....	136
Tabel 4.16. Pengaturan tentang Unsur-Unsur dan Sistem Pemilu dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait Penyederhanaan Jumlah Partai di DPR .....	145
Tabel 4.17. Simulasi Penerjemahan Suara menjadi Kursi DPR dengan Metode <i>Sainte-Lague</i> .....	150
Tabel 4.18. Perbandingan Upaya Penyederhanaan Jumlah Partai Politik dalam DPR pada Undang-Undang yang tentang Pemilihan Umum Legislatif Pasca-Reformasi .....	154
Tabel 4.19. Jumlah Peserta Pemilu Pasca-Reformasi dan Partai Politik yang Masuk dalam DPR .....	156

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Grafik <i>Rae Index</i> dan <i>Laakso and Taagepera Index</i> di Indonesia Reformasi.....	87
--	----